



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri : Beberapa Ormas Di Daerah Diduga Anti-Pancasila, Sekarang Lagi Dikaji Serius
Tanggal	: Sabtu, 12 Agustus 2017
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

TJAHYO KUMOLO, Menteri Dalam Negeri

Beberapa Ormas Di Daerah Diduga Anti-Pancasila, Sekarang Lagi Dikaji Serius

SETELAH membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam waktu dekat pemerintah akan membubarkan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya yang diduga juga berideologi anti-Pancasila. Namun, organisasi kemasyarakatan yang bakal dibubarkan bukan di tingkat nasional, melainkan hanya di tingkat provinsi.

Sebelumnya, pemerintah telah membubarkan HTI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan HTI. Selain bicara soal pembubaran organisasi kemasyarakatan, Mendagri juga menanggapi usulan DPR yang meminta anggarannya dinaikan dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Berikut penuturan lengkap Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo;

Setelah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, kabarnya pemerintah berencana membubarkan beberapa organisasi lainnya?

Iya, ini memang ada beberapa ormas kecil tapi skupunya provinsi. Dari Kemendagri sudah

memang ada berapa organisasi kemasyarakatan sih yang bakal dibubarkan?

Saya belum bisa sebutkan.

Ada puluhan jumlahnya?

Enggak, enggak di bawah lima kok. Skalanya kecil saja.

Ormas-ormas itu ada di daerah mana saja?

Ya dia punya gerakan di lebih dari 4-5 provinsi di Pulau Jawa.

Ormas apa saja itu?



Jangan dulu dong, kecil, tidak berskala nasional. Pak Dirjen (Direktur Jenderal) Polhuk (Politik, Hukum, dan Keamanan)

sudah laporan ke saya, ini perlu data yang akurat.

Pergerakan ormas ini bagaimana?

Nanti nanti. Kalau Anda cermat, pernah dilempar kepolisian juga kok. Kan harus kita klarifikasi, ada bukti yang kuat, begitu saja. Karena HTI aja kan

10 tahun dicermati, kita cross ke semua.

Prediksi berapa lama lagi akan resmi dibubarkan?

(Saya) Belum (bisa) janji.¹⁴

Soal lain. Terkait ditetapkannya Ketua DPRD Malang, Jawa Timur, sebagai tersangka?

Saya cukup kaget ya karena rakor (rapat koordinasi) asosiasi Wali Kota se-Indonesia ditempatkan di Kota Malang, saya hadir, pimpinan KPK hadir, Bapak Presiden hadir. Dipilihnya Malang sebagai tuan rumah rakor itu, karena kota tersebut dianggap memiliki prestasi. Contohnya dari segi e-planning dan budgeting. Ternyata itu juga tidak menuju kemungkinan bahwa yang dikemas bagai ternyata di tahun 2015 juga terjadi indikasi.

Kalau sudah menggunakan e-planning dan e-budgeting kok masih ada saja celahnya?

Semua masih berputar pada masalah perencanaan anggaran, perencanaan anggaran yang di mark up, dan lain-lain. Semua kan masih ada perjalanan anggaran, dana hibah bantuan, retribusi pajak, kemudian masalah pembelian barang dan jasa, sampai

yang dibongkar KPK adalah jual-beli jabatan. Ternyata dari tahun ke tahun tidak berkurang, tapi meningkat. Itulah yang saya kira KPK menggebrak semua daerah beliau (KPK) masuk.

Tetapi kenaikan anggaran yang diajukannya cukup besar lho sampai Rp 7,25 triliun...

Saya yakin DPR mengajukan anggaran tidak main-main. Sudah sesuai kebutuhan yang ada, perkiraan yang ada. Bagi pemerintah saya yakin sepertinya itu visible bisa diperlengkungjawabkan saya kira enggak ada masalah. Tinggal masyarakat menilai saja, saya yakin DPR tidak akan bisa main-main lagi.

Memang tambahan anggaran itu nantinya akan digunakan DPR untuk apa saja sih?

Dia (DPR) mengajukan anggaran entah itu untuk rehab gedung karena gedung yang diambil anggota ini dari sisi keamanan yang dulu hanya untuk 2-3 orang sekarang dengan staf ahlinya satu ruangan bisa untuk 4-5 orang. Ini kan ada sedikit gempa akan sangat mengharapkan. Mungkin pertimbangannya itu aspek keamanannya. Saya kira pemerintah saya yakin bisa memahami.

Terakhir, terkait pilgub, persiapan PDI Perjuangan bagaimana?

Kalau partai jangan tanya saya, tanya partai saja. ■ NNM